

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik adalah proses menganalisis laporan akuntansi yang digunakan dalam mengelola dana publik dari badan negara yang lebih tinggi. (Bastian, 2014: 2). Akuntan publik juga erat kaitannya dengan penerapan dan perlakuan akuntansi publik. Sementara itu, sektor publik sendiri memiliki dimensi yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/korporasi.

Haryanto dkk (2017) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai merupakan perwujudan dari implementasi urusan pemerintah sesuai bidang pemerintahan yang menjadi

tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tahun dan diakhiri jabatan kepala pemerintah. (Pamungkas, 2012)

Pengaturan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja serta laporan pemerintah pusat.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Akuntabilitas dalam instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan

iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. (Bahari, 2012)

Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan system keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola dana dengan system desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. (LAN dan BPKP, 2000)

Pengembaharuan di bidang perencanaan dan penganggaran pada saat dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah telah menetapkan PP Nomor

21 tahun 2004 yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan pendekatan, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja.

Ciri utama dari implementasi anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan hasil yang diharapkan (output), yang nantinya dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisien kegiatan. Menurut Susanto (2016) menyatakan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja memiliki tujuan yaitu dengan menggunakan informasi kinerja yang secara sistematis, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik dengan melibatkan antara pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang akan dicapai. Selain dengan pengertian dan tujuannya, persyaratan mendasar dalam penerapan bentuk sederhana dari penganggaran berbasis kinerja diantaranya adalah adanya informasi mengenai tujuan dan hasil dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk indikator kinerja kunci dan terdapat proses penyusunan anggaran yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan informasi tersebut. Jadi, suatu pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan bentuk sederhana dari penganggaran berbasis kinerja apabila telah menetapkan indikator kinerja untuk mengukur hasil dari pengeluaran anggaran yang dilakukan dan menggunakan indikator tersebut dalam proses penyusunan anggaran.

Pengawasan internal merupakan fungsi manajemen yang penting dalam tata kelola pemerintahan. Pengawasan internal dapat digunakan oleh instansi pemerintah untuk menentukan bahwa mereka telah bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan mandat dan fungsinya. Selain itu, pengawasan internal atas

penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong tercapainya *good governance, dan clean government* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. (Pamungkas, 2012).

Pengawasan internal meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta benda dan dapat dipercayainya catatan keuangan (pembukuan). Sedangkan pengawasan administratif meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan pembukuan (Pratiwi, 2016)

Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara internal yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang berlaku. Pengawasan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, keandalan laporan keuangan di sektor pemerintahan, serta ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. (Santoso, 2021)

Di Indonesia penelitian mengenai penerapan akuntansi sektor publik, implementasi anggaran basis kinerja dan pengawasan internal telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya adalah Pratiwi (2016), Irani (2014), Nirmalasari (2018) dan Binawati (2015). Penelitian Pratiwi (2016) menemukan bahwa penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas instansi

pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan penelitian oleh Irani (2014) dan Nirmalasari (2018) menemukan bahwa akuntansi sektor publik penerapan penganggaran berbasis kinerja dan pengawasan internal memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian lanjutan dilakukan oleh Binawati (2015) menunjukkan bahwa faktor sumber daya, informasi dan orientasi tujuan terbukti berpengaruh terhadap pengimplementasian anggaran berbasis kinerja, dan pengimplementasian anggaran berbasis kinerja terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada gap hasil dari penelitian Pratiwi (2016) dengan Irani (2014) yang menemukan adanya hasil penelitian yang berbeda.

Berdasarkan gap hasil dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Peneliti mencoba mengembangkan penelitian dengan menguji kembali penerapan akuntansi sektor publik, implementasi anggaran berbasis kinerja dan mengkolaborasikan pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa, selain itu peneliti berfokus meneliti pada pemerintah desa di Kecamatan Klirong, Kebumen, dalam penelitian sebelumnya berfokus pada pemerintah daerah.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud menguji hubungan pengaruh antara penerapan akuntansi sektor publik, implementasi anggaran berbasis kinerja, dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah desa. Sehingga judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah **Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa. Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Klirong Kebumen.**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah

1. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Klirong, Kebumen?
2. Apakah implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Klirong, Kebumen?
3. Apakah pengawasan internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Klirong, Kebumen?
4. Apakah penerapan akuntansi sektor publik, implementasi anggaran berbasis kinerja, dan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Klirong, Kebumen?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah

1. Batasan variabel dalam penelitian adalah menggunakan variabel independen yaitu penerapan akuntansi sektor publik, implementasi anggaran berbasis kinerja, pengawasan internal dan satu variabel dependen

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Klirong, Kebumen

2. Batasan waktu penelitian dari bulan September 2022 sampai dengan Juli 2023
3. Batasan tempat dalam penelitian dilakukan di Kantor Balai Desa di Kecamatan Klirong, Kebumen.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Klirong, Kebumen.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Klirong, Kebumen.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Klirong, Kebumen.
4. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh akuntansi sektor publik, implementasi anggaran berbasis kinerja, dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Klirong, Kebumen.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Klirong, Kebumen.
2. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi bagi pemerintah desa terkait penerapan akuntansi sektor publik, implementasi anggaran berbasis kinerja dan pengawasan internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa

1.6 Sistematika Penelitian

Agar dapat memperjelas dan memberikan gambaran secara umum terkait bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menjabarkan secara ringkas tentang isi dari masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bagian pertama dalam penulisan penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi landasan pemikiran secara garis besar baik pembahasan secara teoritis maupun fakta serta pembahasan permasalahan yang ada dilapangan, yang mendasari akan minat dan pentingnya penelitian untuk dilaksanakan. Selanjutnya terdapat pembahasan terkait rumusan masalah dimana dalam sub bab ini berisi tentang pertanyaan dari permasalahan dalam penelitian untuk dapat

dipecahkan jawabannya dari sebuah penelitian. Setelah rumusan masalah lanjutnya pada tujuan penelitian, batasan penelitian sebagai batasan dalam melakukan pengamatan penelitian , manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian yang kaitannya dengan gambaran umum dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka menjabarkan terkait dengan teori yang menjadi dasar dalam penelitian serta teori-teori yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan membahas tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain penjabaran yang kaitannya dengan teori dan penelitian terdahulu terdapat kerangka konseptual yang kaitannya dengan hubungan antar variabel yang digunakan peneliti yang digambarkan dengan bagan alur serta berisi hipotesis-hipotesis yang terkait dengan penelitian.

BAB 3: METODA PENELITIAN

Bab Metoda penelitian yang berisi dengan jenis penelitian yang berisi terkait dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian lapangan. Populasi dan sampel penelitian yang menjabarkan terkait pihak-pihak yang akan berkaitan dengan penelitian baik lokasi penelitian dan organisasi yang menjadi objek untuk penelitian.jenis data dan variabel, sub-bab ini menjabarkan kaitannya dengan jenis-jenis penelitian yang digunakan dan variabel-variabel dalam penelitian baik

variabel secara independen maupun dependen. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data dalam sub bab ini mendeskripsikan lebih lengkap tentang pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan didalam penelitian. Terakhir dalam bab metoda penelitian terdapat sub-bab metoda analisis data, yang kaitannya dengan metoda analisis data kuantitatif peneliti.

BAB 4: DATA DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini berisi tentang data induk penelitian yang menjelaskan terkait berbagai data utama dalam penelitian yang telah diperoleh melalui beberapa proses pengumpulan data yang akan diuji lebih lanjut. Adanya analisa deskriptif tentang penjabaran secara deskriptif terkait data penelitian yang dilakukan dilapangan dan dilanjutkan dengan analisis data dimana data penelitian yang telah didapat diolah untuk menjawab beberapa rumusan masalahnya melalui hasil dari pengujian hipotesisnya. Setelah data diolah selanjutnya melakukan pembahasan secara detail dan dihubungkan hasil tersebut dengan teori dan penelitian terdahulu, dalam pembahasan ini yang menjadikan dasar dalam pembuatan kesimpulan dan saran.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan merupakan uraian secara jelas dan ringkas dan dalam simpulan ini menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selain simpulan terdapat sub bab saran dimana peneliti dapat menguraikan

beberapa saran-saran ataupun rekomendasi penelitian keterbatasan peneliti serta saran bagi peneliti selanjutnya.